



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SALMAN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 196496

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.960.000.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT ,
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 70.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 352 m2/154 m2 di KAB / KOTA
LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/142 m2 di KAB / KOTA
GOWA, WARISAN Rp. 2.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 469.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 109.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 5.500.000
3. MOBIL, WULING ALMAZ RS PRO Tahun 2021, WARISAN Rp.
350.000.000
4. LAINNYA, ELEMENT (SEPEDA) ROADBIKE Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 295.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 40.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 34.514.023**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.799.014.023

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.799.014.023

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.